

ABSTRAK

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yaitu dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang/atau jasa baginya, dan menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab. Penghentian produksi sepeda motor Honda City Sport 1 berdampak kepada konsumen yang telah membeli dan menggunakan sepeda motor tersebut, kelangkaan suku cadang mengakibatkan konsumen kesulitan untuk mendapat suku cadang. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Diperoleh suatu kesimpulan bahwa pertama, Pasal 25 UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. Kelalaian pelaku usaha untuk menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan serta tidak atau gagal memenuhi jaminan atau garansi akan melahirkan gugatan konsumen untuk menuntut ganti rugi. Kedua, Penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan konsumen atas kelangkaan suku cadang sepeda motor tersebut dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen karena penyelesaian sengketa melalui BPSK dilakukan secara cepat, mudah dan murah. Pihak Honda bertanggung jawab memberikan ganti kerugian karena tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan. Ganti kerugian yang harus dilakukan pihak Honda dapat berupa: Pengembalian uang atau pengantian barang, atau tersedianya.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Konsumen, Garansi

ABSTRACT

Consumer protection is any effort that ensures legal certainty to provide services to consumers by improving the consumer's dignity and prestige as well as open access to information about goods / or services, and cultivate an honest and responsible business attitude. The stop production of Honda City Sport 1 motorcycles has an impact on consumers who have bought and used the motorcycle, the scarcity of consumer parts to get spare parts. The research approach uses a statutory approach and a conceptual path. The first conclusion is obtained, Article 25 UUPK stipulates that business actors producing goods that utilize it within the time limit of at least one year of access shall be obliged to provide spare parts and / or after-sales facilities and shall fulfill the guarantee or guarantee in accordance with the agreement. Negligence for the benefit of spare parts and / or repair facilities and warranties will result in a consumer lawsuit to demand. Second, Dispute settlement that can be done by consumers on the scarcity of motorcycle spare parts is done through Consumer Dispute Settlement Board because dispute settlement through BPSK is done quickly, easily and cheaply. The Honda party is liable to provide compensation for not providing or failing to provide parts and / or facilities. Replace the losses that must be done the Honda can: Refund or replacement of goods, or availability.

Keywords: Legal protection, Consumer, Warranty